



URGENSI ORGANISASI DAN MANAJEMEN DALAM PEMERINTAHAN

Oleh

Kanz Yafi Muhammad¹, Fanila Kasmita Kusuma²

^{1,2}Praktik Perpolisian Tata Pamong IPDN

Email: [1kanzvafi05@gmail.com](mailto:kanzvafi05@gmail.com), [2fanilakasmitakusuma@gmail.com](mailto:fanilakasmitakusuma@gmail.com)

Abstract

Government organizations are also stated as wheels of government that come from the community as the source of their legitimacy. Public trust in government must be balanced with good quality performance so that people feel they are getting effective and efficient services. It is known that government management is currently experiencing many problems, both internal and external, that have not been resolved. This study uses a descriptive qualitative approach. The organization and management of the current Indonesian government is heavily influenced by the role of technology. However, the uneven application of ICT, organizational culture that is not the same, leadership that is not yet stable, and the level of ability of human resources that is less reliable means that government organizations have not fully achieved good governance. Policies issued by government organizations in the field of application and use of technology are currently not fully implemented. Every organization has a government service portal but this cannot support a better direction because the use of ICT is still very minimal

Keywords: Organization, Management, Government

PENDAHULUAN

Secara tidak sadar manusia dari lahir hingga akhir hayat memerlukan beberapa kelompok sosial. Mulai dari kelompok sosial terdekat seperti keluarga dengan anggota kecil yang terdiri ayah, ibu, anak, suami, istri, kakak, serta adik. Manusia mengalami fase pertumbuhan yang sangat cepat hingga akhirnya memasuki dunia sekolah dengan kelompok kelas tertentu seperti kelompok futsal, kelompok renang, kelompok anak kelas satu hingga kelompok kelas perkuliahan. Tak lama kemudian, manusia akan melanjutkan pada fase dunia kerja. Pada fase ini manusia berada di perkumpulan manusia-manusia dengan berbagai minat yang dipilih sesuai dengan profesi masing-masing. Dalam kelompok kerja tentunya manusia memainkan perannya masing-masing seperti ada yang menjadi ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, ahli bidang, dan berbagai peran lainnya dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Singkatnya manusia mulai bergabung

dengan organisasi paling dekat yang disebut organisasi genetis, kemudian organisasi masyarakat, organisasi Pendidikan, organisasi nasional, hingga organisasi internasional yang tiap organisasi tersenut memiliki struktur fisik yang terdiri dari subsistem.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa organisasi diciptakan sesuai dengan kepentingan manusia. Sebagai makhluk yang berpikir manusia diharuskan untuk bisa mengelola, mengatur hingga mengembangkan tiap hal. Dalam hal ini manusia memerlukan sebuah pengorganisasian. Keberadaan organisasi juga menjadi suatu tantangan bagi orang-orang didalamnya. Terlepas dari berbagai latar belakang budaya, kebiasaan, perilaku, dan pemikiran anggotanya. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki beribu suku bangsa dan ratusan bahasa. Seperti data yang didapatkan dari Badan Statistik dan data pokok Kebahasaan dan Kesusateraan RI yang menyebutkan bahwa Indonseia teridri dari 1.340 bangsa dan 718



bahasa. Tak hanya itu, Indonesia yang juga terkenal sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Hal ini juga turut mempengaruhi suatu sistem organisasi baik secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh ini tidak hanya pada sistem organisasi tetapi juga pada bentuk dan model organisasi itu sendiri. Organisasi dijalankan dengan memperhatikan beberapa prinsip seperti pembagian kerja, disiplin, kesatuan komando, tanggung jawab dan wewenang, subordinasi minat dibawah dan minat pada umumnya, kesatuan Langkah, pemusatan atau sentralisasi, pemberian hadiah, ketertiban, stabilitas jabatan pegawai, inisiatif, keastuan jiwa korps, dan jenjang hirarki (Syukran dkk, 2022)

Organisasi juga memiliki peranan penting dalam pelaksanaan praktik pemerintahan. Dalam suatu kekuasaan pemerintahan dibutuhkan penggerak aktivitas baik dalam kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislatif. Pemerintah dianggap sebagai alat organisasi yang menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Pemerintah memiliki defenisi yang merupakan suatu Lembaga terstruktur yang menjalankan wewenangnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pemerintah tanpa kekuasaan tidak dapat berjalan (Dian dkk, 2020).

Menurut penjelasan di atas, organisasi berdasarkan arah strategisnya dapat melakukan Tindakan seperti memusatkan perhatian pada fungsi pemerintah untuk menghadapi perubahan lingkungan yang dirasa sangat cepat. Strategi yang ditempuh dapat dengan dilakukannya perubahan dengan upaya untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta dapat melayani masyarakat sesuai harapan.

Organisasi dapat dikatakan berhasil jika dapat menemukan kebalik jati dirinya secara terus menerus. Kegiatan rekstrukturisasi merupakan kegiatan yang berupaya untuk memodifikasi organisasi melalui bantuan manajemen. Hal ini diharapkan agar organisasi mampu beradaptasi dengan

lingkungan. Rekstrukturisasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan (Effendi, 2022).

Diketahui organisasi pemerintah atau biasa disebut dengan *government organization* merupakan wujud dari berbagai organisasi nirlaba. Lembaga pemerintah menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat secara luas. Organisasi pemerintah memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan baik dalam bidang Kesehatan, bidang Pendidikan, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pembangunan, dan berbagai bidang lainnya di masa mendatang.

Organisasi pemerintah juga dinyatakan sebagai roda pemerintahan yang berasal dari masyarakat sumber legitimasinya. Kepercayaan dari masyarakat kepadapemerintahan harus diimbangi dengan kualitas kinerja yang baik sehingga masyarakat merasa mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan dari organisasi pemerintahan juga tentunya memerlukan peranan pimpinan. Tak hanya itu, peran manajemen juga diperlukan untuk mendorong sumber daya manusia yang dapat bekerja dengan baik. Penilaian kinerja organisasi dapat dilihat dari kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Organisasi perangkat daerah ialah organisasi yang dapat mengatur penerapan penata kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan prinsip organisasi untuk mencapai visi misi yang jelas. Sedangkan satuan kerja perangkat daerah ialah Lembaga pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten atau kota yang terdiri dari beberapa struktur seperti staf, staf ahli, skertariat daerah, sekretariat DPRD, dinas-dinas, badan-badan, dan inspektorat yang memiliki wewenang kerja tersendiri. Satuan kerja perangkat daerah memiliki peranan penting untuk menata dan meningkatkan kinerja.



Begitu juga dengan tata Kelola yang baik maka dapat menunjang kinerja yang baik. Untuk mendapatkan kinerja yang baik maka tata Kelola harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Salah satu ciri kinerja yang baik ialah adanya pengendaaia intern dan evaluasiketat. Kegiatan ini bertujuan untuk menghindari korupsi, kolusi, nepotisme. Tata Kelola yang buruk dapat mengakibatkan munculnya kejahatan dalam pemerintahan seperti penggelpan dana simpanan pemerintah demi kepentingan individu.

Untuk menghindari hal diatas, manajemen pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kompleksnya masyarakat dalam membutuhkan barang dan jasa publik yang terbatas. Manajemen disini diperlukan untuk melakukan evaluasi kualitas organisasi pelayanan baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Selain itu, manajemen pemerintah saat ini diketahui masih banyak mengalami permasalahan baik internal ataupun eksternal yang belum teratasi. Permasalahan internal meliputi dari berbagai faktor seperti desentralisasi dan demokrasi. Sedangkan permasalahan eksternal ialah faktoryang muncul dari revolusi dan globalisasi teknologi informasi yang dalam hal ini menjadi tantangan bagi organisasi pemerintah untuk menciptakan manajemen pemerintahan yang bersih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Pendekatan ini diketahuideangan cara menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga peneliti akan mendapatkan data yang objektif. Peneliti kualitatif ialah penelitian yang memahami kejadian yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data dengan referensi dari penelitian terdahulu, sumber bacaan, dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu . Organisasi menurut para ahli didefenisikan sebagai berikut:

1. Menurut Stephen F. Robbins, organisasi merupakan kumpulan unit yang didirikan untuk bekerja sama mencapai tujuan tertentu denga pola kerja teratur dalam jangka Panjang.
2. Menurut David Cherrington, organisasi merupakan kumpulan orang yang memiliki polla kerja tertentu yang didirikan untuk mencapai tujuan yang direncanakan.
3. Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dari dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
4. Menurut W. J. S. Poerwadarminta yakni organisasi merupakan susunan dan aturan dari berbagai bagian (orang atau kelompok) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan tertera.

Kerja sama dapat terwujud jika adanya komunikasi serta diskusi yang dilakukan oleh orang-orang di dalamnya saat menyelesaikan tugas masing-masing. Beberapa prinsip pokok organisasi, yaitu:

1. Seluruh orang yang berada di dalam suatu organisasi tertentu harus memiliki pandangan yang sama
2. Organisasi memiliki tujuan dan sasaran yang jelas



3. Pemimpin organisasi harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan para anggotanya baik dalam menyelesaikan tugas, memegang tanggung jawab serta wewenang.

4. Dalam suatu organisasi harus memiliki struktur yang jelas sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut sehingga tidak adanya tumpang tindih yang dialami oleh anggota terhadap pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya.

Tujuan organisasi secara umum ialah dapat menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan. Sedangkan tujuan organisasi secara khusus ialah sebagai berikut:

1. Hasil yang dicapai terpenuhi secara menyeluruh
2. Sasaran yang meliputi dimensi kualitas dan kuantitas dapat dikategorikan secara spesifik
3. Adanya alasan dasar didirikannya suatu organisasi
4. Situasi dimasa mendatang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dari misi.

Prinsip organisasi memiliki tujuan yang tepat sesuai dengan saran yang dikehendaki. Tujuan organisasi dicapai secara bersama-sama baik atasan dan bawahan. Atasan dalam suatu organisasi tertentu memiliki tanggung jawab atas bawahan, dan bawahan memiliki tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh atasan. Hal ini disebabkan karena organisasi membutuhkan prinsip keseimbangan. Keseimbangan dapat dicontohkan seperti keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab anggota kelompok organisasi. Kemudian, dijelaskan tentang prinsip pendistribusian pekerjaan atau prinsip pembagian tugas. Prinsip ini merupakan pengelompokan antara tugas sejenis serta pekerjaan yang erat kaitannya dengan unit tertentu. Selanjutnya prinsip rentangan

pengawasan yang merupakan prinsip untuk melihat kemampuan seorang pemimpin dalam mengawasi kualitas bawahannya. Selanjutnya prinsip pelimpahan wewenang yang merupakan prinsip dserahkannya Sebagian kekuasaan atasan kepada orang lain. Kemudian, prinsip penempatan pegawai sesuai dengan bidangnya (Syukran dkk, 2022).

Di dalam organisasi terdapat perilaku organisasi. Perilaku organisasi dapat diartikan sebagai suatu kenyataan bahwa tiap individu memiliki sikap, tabiat, dan kebiasaan yang terbentuk dari lingkungan organisasi tersebut. Dua macam ilmu perilaku organisasi, yaitu:

1. Setiap anggota organisasi pasti memiliki berbagai macam bersamaan.
2. Setiap anggota organisasi memiliki berbagai perbedaan.

Oleh karena itu terdapat prinsip-prinsip dasar perilaku organisasi menurut Abraham, dkk. Sebagai berikut:

1. Manajemen harus dipertimbangkan secara hati-hati tetapi tidak dapat dijadikan proses secara ketat.
2. Pendekatan manajer individu harus disesuaikan dengan situasi yang ada.
3. Pendekatan motivasi dan komitmen sangat dibutuhkan di dalam organisasi.

Setiap anggota organisasi memiliki keinginan yang diusahakan harus terpenuhi demi keputusan mereka. Keinginan-keinginan tersebut antara lain:

1. Memperoleh kemajuan karir dari kesempatan yang ada
2. Mmiliki jaminan keselamatan dan keamanan kerja
3. Menginginkan perlindungan sebagai haknya sebagai individu
4. Diberikannya pekerjaan yang cukup menarik perhatian
5. Imbalan jasa yang sesuai
6. Memiliki pemimpin yang baik dalam bersikap dan berfikir



7. Adanya pemberian motivasi atau teman kerja yang baik
8. Memiliki teman yang pencapaiannya lebih tinggi sehingga dapat menarik dirinya. (Panuntun, 2020).

Kualitas pelayanan masyarakat dihasilkan dari organisasi pemerintah yang ramping. Organisasi pemerintah yang seperti inilah dapat membantu masyarakat dengan diberikannya kemudahan bagi penerima pelayanan. Organisasi pemerintah yang ramping dapat menjadi lembaga pemerintah yang mempunyai prosedur tersendiri untuk dipahami masyarakat, tidak berbelit-belit, adanya kejelasan dan kepastian hukum. Jika ingin melihat kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi pemerintah maka dapat ditinjau dari sisi pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan wewenang. Selain itu, kesuksesan dan kegagalan organisasi pemerintah juga ditentukan oleh kepemimpinan dan kapasitas organisasi pemerintahan itu sendiri. Jika organisasi pemerintahan ini sukses maka dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, dan sebaliknya jika organisasi pemerintahan mengarah ke arah gagal maka organisasi pemerintahan tersebut akan meruntuhkan kinerja lembaga di Indonesia (Thaha, 2009).

Organisasi juga memiliki struktur yang dapat mengarahkan pandangan ke depan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang sangat pesat saat ini. Dengan berbantuan teknologi yang sistematis, maka visi misi serta tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah sesuai dengan harapan masyarakat. Kemajuan teknologi memberikan dampak perubahan yang besar pada organisasi pemerintahan seperti adanya perubahan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi pemerintah, pada masa perubahan teknologi yang cepat maka organisasi pemerintah harus melakukan introspeksi diri dengan mendeteksi perkembangan yang akan dilakukan agar dapat

berjalan efisien dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan publik yang akuntabilitas dan transparan. Organisasi pemerintah perlu mempelajari teknologi di era derasnya arus perkembangan teknologi. Hal ini bertujuan agar organisasi pemerintah dapat menghadapi bahaya ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada.

Perubahan organisasi pemerintah dapat ditandai dengan berkembangnya kualitas pelayanan dari segi pelayanan kepada masyarakat. Faktor yang dapat mempengaruhi perubahan dan perkembangan organisasi pemerintah ialah gaya kepemimpinan, struktur dan budaya organisasi. Adanya perubahan ini dapat meningkatkan kecepatan birokrasi dalam pelayanan publik. Selain itu, organisasi pemerintahan juga mempunyai ciri kelemahan seperti pada bidang checks and balances.

Tak hanya teknologi, dalam suatu organisasi peranan pemimpin yang profesional, penerapan metode yang tepat, serta kemampuan mengambil kesempatan juga menjadi faktor terwujudnya program dari organisasi pemerintahan itu sendiri. Dalam organisasi pemerintah terdapat surat perintah untuk melaksanakan tugas-tugas seperti tugas khusus. Tugas tersebut terdiri dari bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pengarsipan dan dokumentasi, kependudukan dan pelayanan kesehatan, perpustakaan, pengawasan, dan pengarsipan. Pelaksanaan tugas dilakukan dengan cara tiap-tiap organisasi pemerintah menyusun pedoman teknis sesuai dengan bidangnya (Effendi, 2022).

Manajemen diartikan sebagai fungsi dalam pelaksanaan kebijakan yang mempunyai batasan penyelenggaraan dan dalam pekerjaan organisasi manajemen memiliki tujuan khusus yang akan datang (Oliver Sheldon). Di bawah ini beberapa pengertian manajemen menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Prajudi, manajemen diartikan sebagai pemanfaatan dari semua faktor menurut perencanaan



yang diperlukan sebuah penyelesaian dan pencapaian.

2. Menurut Prof. Soerjono Soekanto bahwa ilmu pengetahuan (knowledge) yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran pengetahuan mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah (kontrol) dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya. Perumusan tadi sebetulnya jauh dari sempurna, akan tetapi yang terpenting adalah bahwa perumusan tersebut telah mencakup beberapa unsur yang pokok.
3. Unsur-unsur (elements) yang merupakan bagian-bagian yang tergabung dalam suatu kebulatan adalah:
 - a. Pengetahuan (knowledge)
 - b. Terusan secara sistematis
 - c. Menggunakan pemikiran
 - d. Dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum (obyektif) (Dian, dkk. 2020).

strateginya diperlukan manajemen birokrasi yang profesional dengan memperhatikan beberapa hal, yakni:

1. Merubah persepsi dan paradigma birokrasi mengenai konsep pelayanan;
2. Adanya kebijakan publik yang lebih mengutamakan kepentingan publik dan pelayanan publik dibanding dengan kepentingan penguasa atau elit tertentu;
3. Unsur pemerintah, privat dan masyarakat harus merupakan all together yang sinergi;
4. Adanya peraturan daerah yang mampu menjelaskan mengenai standart minimal pelayanan publik dan sanksi yang diberikan bagi yang melanggarnya;
5. Adanya mekanisme pengawasan sosial yang jelas mengenai pelayanan publik antara birokrat dan masyarakat yang dilayani;

6. Adanya kepemimpinan yang kuat (strong leadership) dalam melaksanakan komitmen pelayanan publik;
7. Adanya upaya pembaharuan dibidang sistem administrasi publik (administrative reform);
8. Adanya upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowerment) secara terus menerus dan demokratis, dst. (Irawan, 2013).

Manajemen pemerintahan sebagaimana tuntutan keberadaannya dan tuntutan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, seyogyanya berubah sejalan dengan tuntutan globalisasi, pola-pola manajemen tradisional feodal diganti dengan pola modern yang demokratis. Hal itu paling tidak karena manajemen pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kepolitikan global, kepentingan nasional dan tentunya kepentingan regional serta kepentingan lokal. Pemahaman ini perlu ditekankan bagi manajemen pemerintahan di daerah karena era global berarti pasar global, ekonomi global dan nilai-nilai global. Adapun kepentingan nasional bertumpu pada terjaminnya stabilitas negara, integrasi politik dan integrasi ekonomi, sedangkan kepentingan lokal diorientasikan pada terpenuhinya kenyamanan lingkungan lokal, yang meliputi kesejahteraan, stabilitas politik dan stabilitas ekonomi serta terjaganya lingkungan fisik maupun non fisik. Dengan demikian perlu adanya perubahan manajemen yang berbasis akuntabilitas, transparan, keterbukaan dan didasarkan pada ketegasan dalam penegakan hukum perlu dilakukan. Namun demikian untuk terjadinya perubahan manajemen tersebut, maka perlu lebih dipahami tentang demokratisasi pada pemerintahan di Daerah.

Tuntutan terhadap dilaksanakannya good governance dalam manajemen pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari terbukanya informasi dan meluasnya wacana demokratisasi dalam kehidupan rakyat dan



pemerintah. Disamping tuntutan terhadap keadilan, ketertiban dan kesejahteraan, transparansi perimbangan keuangan dalam hubungan pusat dan daerah dan demokratisasi yang memenuhi ukuran standar hak asasi manusia. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan otonomi membutuhkan manajemen pemerintahan daerah yang berorientasi pada good governance, demokratis dan memahami lingkungan sebagaimana daerah istimewa Aceh dan Propinsi Papua. Terlepas dari model otonomi di atas, manajemen pemerintahan daerah otonom harus tetap berada dalam koridor UU tentang Pemerintahan Daerah dan melaksanakan fungsi ke pemerintahannya dalam kerangka otonomi daerah. Untuk itu manajemen pemerintahan di daerah otonom harus memahami secara utuh makna dan implementasi otonomi daerahnya. Pemahaman yang dimaksud adalah: Pertama, daerah berhak atas tambahan sumber keuangan yang memadai dalam pembiayaan pembangunan yang didapat dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dan bagi hasil atas pajak dan sumber-sumber keuangan yang didapat dari daerah. Daerah berhak atas pasokan aparatur pemerintahan yang memiliki kualifikasi profesional dan accountable untuk dapat mendinamisasikan pembangunan di daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Otonomi Daerah yang diharapkan adalah otonomi daerah yang bertanggung jawab karena dilakukan oleh aparatur yang profesional, berdisiplin dan berorientasi pada target untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kedua, daerah berhak untuk memiliki kewenangan atas kelembagaan, kebijakan dan keuangan daerah. Dengan otoritas tersebut, daerah dapat mengambil inisiatif sendiri sesuai dengan tuntutan kepentingan di daerah, baik menyangkut perlengkapan, keorganisasian maupun pembiayaan. Kewenangan di atas merupakan hak daerah yang merupakan implementasi dari diberlakukannya otonomi yaitu : (a) Pembaharu yang potensial di daerah,

sehingga dapat memasuki dan mengikuti proses pembangunan, (b) Pembuatan keputusan dan kebijakan daerah akan semakin cepat, sehubungan pendeknya jalur birokrasi yang harus dilalui, (c) Pengawasan terhadap aparat akan semakin mudah untuk dilaksanakan baik dilakukan secara personal, maupun dilaksanakan secara organisatoris; dan (d) Dapat mengeliminasi dan menyeragamkan masalah melalui aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pusat, hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Ketiga, implementasi kebijakan dan perubahan manajemen pemerintahan di daerah merupakan proses transformasi organisasi dari bentuk sentralistik ke bentuk yang lebih desentralistik. Proses transformasi organisasi manajemen pemerintahan ini mencakup (1) —reframing‖ yaitu pergeseran konsepsi visi dan misi serta pengukuran keberhasilan manajemen pemerintahan, (2) —restructuring‖ yaitu perubahan struktur, —reengineering‖ proses kerja, alokasi sumber daya dan sebagainya, (3) —revitalization‖ yaitu merubah kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan teknologi, dan (4) —renewal‖ yaitu memperbaharui sistem penggajian, promosi, pengembangan karir dan organisasi. Jadi proses pemberian otonomi daerah kepada daerah harus dilihat dengan proses transformasi organisasi dan keberhasilan daerah atas efektivitas dan efisiensi proses berpemerintahan.

Keempat, dilihat secara teoritis sistem pemerintahan daerah yang berlaku di Indonesia termasuk tipe sistem perferktoral terintegrasi (integrated perfectoral system), yaitu terdapat integrasi dalam dua hal. Terdapat integrasi antara batas-batas daerah otonom dengan batas-batas wilayah administratif di bawah yurisdiksi pemerintah pusat, khususnya pada pemerintah propinsi yang merupakan wakil pemerintah dan memiliki kewenangan lintas kota dan kabupaten (Redjo, 2018).



PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Organisasi dan manajemen pemerintah Indonesia saat ini dituntut untuk berubah dari paradigma feodal tradisional menjadi paradigma modern demokratis. Tuntutan ini disebabkan oleh globalisasi melalui lingkungan, pasar dan kepolitikan yang seluruhnya menggunakan global. Organisasi dan manajemen pemerintahan di Indonesia harus mampu memiliki dan menerapkan good governance, demokratis dan paham lingkungan. Aspek-aspek ini harus diterapkan secara keseluruhan agar dapat terwujud otonomi daerah yang dapat bertumbuhkembang memberikan pelayanan, pemberdayaan, partisipasi dan pembangunan yang lebih baik kepada masyarakat. Kinerja pegawai pemerintahan juga diperlukannya melalui harmonisasi koordinasi, transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas serta penegakkan sanksi hukum yang tegas.
2. manajemen organisasi yang modern demokratis diyakini sebagai sebuah cara untuk mengatur anggota organisasi guna menjalankan instruksi yang sudah diberikan sesuai porsi dan kemampuan anggota oleh pemimpin kepadanya. Hal tersebut dilaksanakan agar mampu mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan arus perubahan zaman di masa sekarang yang memiliki orientasi kedepan dalam jangka waktu yang panjang.
3. Untuk menjadi pemerintahan yang baik harus dilakukannya

sosialisasi terhadap visi misi dan program yang akan dijalankan.

4. Sistem ramping struktur kaya fungsi dapat meningkatkan fungsi organisasi dan dapat menjelaskan lebih detail tentang pelaksanaan penugasan.
5. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia, program perencanaan pembangunan dapat membantu mengoptimalkan fungsi manajemen pemerintah.
6. Pemerintah yang baik hendaknya mensosialisasikan visi dan misi serta secara konsisten dalam menjalankan program pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Saran

Organisasi dan manajemen pemerintah Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh peranan teknologi. Namun, penerapan TIK yang belum merata, budaya organisasi yang tidak sama, kepemimpinan yang belum stabil, dan tingkat kemampuan sumber daya manusia yang kurang handal menjadikan organisasi pemerintah belum sepenuhnya mencapai *good governance*.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi pemerintah dalam bidang penerapan serta pemanfaatan teknologi saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Tiap organisasi pemerintah memiliki layanan portal namun hal ini tidak dapat menunjang ke arah yang lebih baik karena pemanfaatan TIK masih sangat minim. Jika dibandingkan dengan berbagai negara seperti Singapura dan Malaysia, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang tertinggal dari keduanya. Malaysia dan Singapura memiliki layanan back office hingga front office. Dicontohkan dengan adanya passport online di Singapura dan adanya layanan Mycad di Malaysia. Sedangkan di Indonesia layanan e-government seperti registrasi pajak yang masih dilakukan secara manual.



.....
DAFTAR PUSTAKA

- [1] Admin. 2021. Pengertian Organisasi : Manfaat, Tujuan, Ciri-ciri, Unsur dan Konsepnya.
<https://deepublishstore.com/blog/pengertian-organisasi/>. Diakses pada 2 Maret 2023.
- [2] Dian, C. S., & dkk. 2020. MANAJEMEN PEMERINTAHAN. Gorontalo: Ideas Publishing.
- [3] Effendi, L. M. 2022. Upaya Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Menciptakan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Media Birokrasi*. 4(2): 53-58.
<https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2745>.
- [4] Irawan, R. 2013. Urgensi Manajemen Birokrasi Profesional Untuk Mengatasi Kemunduran Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal teropong Aspirasi Politik Islam*. 9(1): 47-57.
<https://doi.org/10.24042/tps.v9i1.1575>.
- [5] Iswanti, D. S. 2018.
<http://repository.unika.ac.id/17354/2/13.60.0225%20DEVI%20SIWI%20ISWANTI%20%284.83%29.BAB%20I.pdf>.
Diakses pada 2 Maret 2023.
- [6] UMY. 2010. Perlunya Manajemen Pelayanan Publik dalam Pemerintahan.
<https://www.umy.ac.id/perlunya-manajemen-pelayanan-publik-dalam-pemerintahan>. Diakses pada 2 Maret 2023.
- [7] Panuntun, S. 2020. Budaya Organisasi Pendidikan Di Indonesia Organisasi Dalam Pendidikan. *Jurnal Intelegensia*. 8(2): 100-105.
<https://doi.org/10.34001/intelegensia.v8i2.1487>.
- [8] Redjo, S. I. 2018. Dinamika Manajemen Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*. 1(2): 1-19.
- [9] Retnoningsih, Y. Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Upaya Pemberdayaan UMKM Produk Carica

Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

<https://media.neliti.com/media/publications/111079-ID-manajemen-pemerintahan-daerah-dalam-upay.pdf>.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN